

PENERAPAN *VALUE FOR MONEY* UNTUK MENILAI KINERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**Andre Hendry Karwur
Ventje Ilat
Sherly Pinatik**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: andre.karwur@gmail.com

ABSTRAK

Merupakan salah satu penunjang kebutuhan mendasar yang dibutuhkan manusia. Pembangunan perkebunan di Sulawesi Utara dilaksanakan selaras dengan pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan daya dukungnya, agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka dengan ini tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara semakin banyak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, melalui pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Dalam penelitian ini, pengukuran nilai ekonomi, menggunakan teknik wawancara, nilai efisiensi menggunakan perbandingan *output* dan *input* dari data LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan nilai efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan nilai *outcome* dan *output*, dimana nilai *outcome* berisi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk tingkat ekonomi dan efisiensi, Dinas Provinsi Sulawesi Utara mampu mencapai hasil yang cukup baik. Namun, untuk tingkat efektivitasnya masih kurang, karena didasari tingkat kepuasan masyarakat yang belum maksimal.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Value For Money.

ABSTRACT

The Plantation is one of the basic needs supporting of human. Plantation development in North Sulawesi implemented with resource management and maintenance. So with this duties and responsibilities by the government, in this case Department of Plantation of North Sulawesi Province is more. The purpose of this research was to determine the financial performance of the Department of Plantation of North Sulawesi Province, through the measurement of 3E (economy, efficiency, and effectiveness). In this research, measurement of economic value is using interview techniques, efficiency value is using the ratio of output and input value from data LAKIP of Department of Plantation of North Sulawesi Province, while the value is calculated based on comparison of outcomes and outputs value, where the outcome shows the level of community satisfaction obtained from the questionnaires to the people of North Sulawesi Province. The results of this research indicate that the economy and efficiency value of the Department of Plantation of North Sulawesi Province Department of Plantation of North Sulawesi Province were able to achieve fairly good results. But, the level of effectiveness is still lacking, because it is based on the level of community satisfaction that is not maximized.

Keywords : Financial Performance, Value For Money.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam arti sebenarnya adalah tujuan mulia yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Utara sebagai sub sistem di dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan penduduk dapat dimungkinkan apabila pendapatan penduduk mengalami kenaikan yang cukup hingga mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupannya. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya.

Sumber daya perkebunan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataannya masih cukup banyak petani dan pelaku usaha perkebunan (agribisnis) belum dapat meningkatkan hasil kebunnya, sehingga pendapatan tidak meningkat.

Perkebunan merupakan salah satu penunjang kebutuhan mendasar yang dibutuhkan manusia. Kualitas perkebunan masyarakat sangat didukung oleh peran serta pemerintah dalam menyediakan layanan sarana dan prasarana yang baik dan terjangkau untuk seluruh kalangan. Adanya desentralisasi menumbuhkan kreativitas daerah untuk membangun daerah masing-masing. Desentralisasi perkebunan secara prinsip menyerahkan urusan perkebunan ke pemerintah daerah. Namun dikhawatirkan, terdapat *gap* antara kebijakan tertulis dari pemerintah pusat dan implementasinya oleh pemda. Terkadang, kebijakan perkebunan digunakan sebagai alat strategis dalam politik tanpa disertai kemampuan dalam menjalankannya. Sehingga, masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah menjadi pihak yang paling dirugikan. Berbagai tuntutan masyarakat tentang pelayanan yang cepat hingga biaya perkebunan yang murah diharapkan mampu direalisasikan pemerintah atas program-program kinerjanya.

Pembangunan perkebunan di Sulawesi Utara dilaksanakan selaras dengan pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan daya dukungnya, agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat secara berkualitas dan berkelanjutan, serta peningkatan peran perkebunan sebagai sumber devisa, penyerap tenaga kerja, pengembangan industri hulu sampai ke industri hilir perkebunan, pengembangan wilayah dan mendukung pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Maka dengan ini tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan Pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara semakin banyak. Termasuk kesiapan dalam menghadapi evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan. Salah satu hal yang dapat di jadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi Pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya (APBD), baik dari sisi *input*, *output*, *impact*, dan *benefit*-nya. Untuk itu Dinas Perkebunan diharapkan agar memperhatikan *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya, dimana konsep pengelolaan ini mendasarkan pada tiga elemen utama (Mardiasmo 2002 : 4), yaitu : (1) Ekonomi, yang terkait dengan sejauh mana organisasi sector public dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros. (2) Efisiensi, merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. (3) Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi *Value For Money* yang benar adalah ; (1) Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, (2) Meningkatnya mutu pelayanan publik, (3) Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*, (4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik, (5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Sangat penting dirasakan adanya penilaian kinerja untuk mengetahui apakah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan program kerjanya dengan baik. Terlebih pelaksanaan program-program yang langsung menyentuh masyarakat karena secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena kita tahu bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara merupakan Dinas yang kegiatannya menyentuh seluruh kalangan masyarakat khususnya masyarakat tani dan esensi dari keberhasilan kinerjanya tersebut adalah dari kepuasan masyarakat itu sendiri tentang bagaimana pelayanan langsung mengenai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul penelitian “Penerapan *Value For Money* Untuk Menilai Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara” untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diukur dari *Value For Money* anggaran dan sebagai evaluasi agar Pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Value For Money* pada : (1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan Penyediaan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan, (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis, (3) Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, industry hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian, dengan kegiatan Promosi Produk Pertanian/Perkebunan (Pameran, Brosur, Leaflet, dll)

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut *Accounting Principle Board* yang dikutip oleh Abdul Halim (2006) Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara alternatif arah dan tindakan.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Pemerintah

Menurut PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945.

Dikutip dari Indra Bastian (2007) fungsi pemerintah yaitu :

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Abdul Halim (2008) memberikan definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Menurut Indra Bastian (2007) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Kinerja

Menurut Indra Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Indikator Kinerja

Menurut Indra Bastian (2006), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan

indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*) dimana Indra Bastian menjelaskan :

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja suatu organisasi perlu dilakukan adanya pengukuran seluruh aktivitas yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Menurut Larry D Stout (1993) dalam Performance Measurement Guide (dalam Indra Bastian, 2006) Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Value For Money

Value for Money adalah salah satu alat pengukuran kinerja untuk menilai suatu kinerja pada perusahaan publik dan juga digunakan untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas segala kegiatan pada organisasi sektor publik tersebut.

Pengertian *Value for Money* dalam buku Manajemen Kinerja Sektor Publik oleh Mahmudi (2005) adalah, bahwa *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor public dimana *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.

Definisi *Value For Money* berdasarkan *Audit Commision* dalam *Final Report* yang disampaikan oleh ITAD, dalam jurnal berjudul *Measuring the Impact and Value For Money of Governance & Conflict Programmes* (Chris Barnett, dkk, 2010) mengungkapkan *VFM is about obtaining the maximum benefit over time with the resources available. It is about achieving the right local balance between economy, efficiency and effectiveness, or, spending less, spending well and spending wisely to achieve local priorities...VFM is high when there is an optimum balance between all three elements, when costs are relatively low, productivity is high and successful outcomes have been achieved.*

Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah *Value For Money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah :

1. Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2006). Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Secara *absolute*, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun, berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien. Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi tingkat efisiensinya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Dimana nilai *output* merupakan hasil persentase perhitungan realisasi fisik lapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan persentase antara dana yang digunakan dengan dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Adapun nilai *output* telah diuraikan dalam Penjabaran APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2012.

2. Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan (Indra Bastian, 2006). Ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Jika suatu organisasi bertujuan membangun suatu rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi, sebuah departemen kecelakaan dan darurat, serta departemen pasien luar dan semua target tersebut tercapai, maka mekanisme kerja organisasi tersebut efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur yang terbangun, maka organisasi tersebut tidak bekerja efektif. Jadi tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti ini bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator hasil. Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara *outcome* dan *output*. Maka, rumus untuk mengukur rasio efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcomes}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Dimana *outcomes* merupakan penilaian publik/pelanggan terhadap hasil dari setiap *output* program pemerintah. Sedangkan *output* merupakan penilaian pemerintah terhadap keluaran dari program dan kegiatan yang telah direalisasikan.

3. Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan *input* dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Indra Bastian 2006). Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan *input*. pertanyaan yang diajukan adalah “apakah organisasi telah mengeluarkan biaya secara ekonomis?”. Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan ; pertama, program sejenis dengan organisasi lain, dan kedua, biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui (Indra Bastian, 2006 : 78). Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis apabila dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Namun, karena keterbatasan penulis dalam menemukan organisasi sejenis yang dapat dibandingkan, maka penulis hanya akan membandingkan biaya yang dikeluarkan (*input*) dengan anggaran yang telah disetujui, dan melalui wawancara.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Harga Input}} \times 100\%$$

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM merupakan standar minimum pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kualitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dan sekaligus akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah. Kedua, SPM sangat mendesak untuk disusun, khususnya bagi kabupaten/kota yang memang secara langsung merupakan penyedia pelayanan publik. Ketiga, posisi propinsi yang dalam pelaksanaan kewenangan daerah lebih banyak bertindak sebagai “pendukung, fasilitator, ataupun koordinator ” bagi pelaksanaan kewenangan lintas kabupaten/kota, maka sebaiknya dalam penyusunan SPM juga tidak melepaskan diri dari posisi dan peran tersebut, sehingga lebih mendorong daerah kabupaten/kota untuk lebih berinisiatif melaksanakan kewenangan daerah. Keempat kemampuan seorang pemimpin daerah dalam mendelegasikan wewenang ke unit-unit organisasi juga menentukan keberhasilan daerah dalam melaksanakan SPM.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Ardi Hamzah (2007)	Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2001)	bertujuan untuk melihat pengaruh rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi	Deskriptif	Hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio kemandirian ¹ , rasio kemandirian ² , dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi 	Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistic deskriptif dan regresi linier berganda, sedangkan penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif (<i>Descriptive Kuantitative Analysis Method</i>)
Dian Annisa (2011)	Evaluasi kinerja keuangan dinas kesehatan kota makassar melalui pendekatan <i>Value for money</i>	Untuk mengetahui kinerja keuangan dinas kesehatan kota makassar melalui pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas	Deskriptif	Tingkat ekonomi dan efisiensi, dinas kesehatan kota makassar mampu mencapai hasil yang cukup baik. Namun, untuk tingkat efektivitas masih kurang, karena didasari tingkat kepuasan masyarakat yang belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan ekonomi pendekatan <i>Value for money</i> 	Objek penelitian pada dinas kesehatan kota makassar, sedangkan penelitian pada dinas perkebunan provinsi Sulawesi utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. pengukuran nilai ekonomi, menggunakan teknik wawancara, nilai efisiensi menggunakan perbandingan *output* dan *input* dari data LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan nilai efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan nilai *outcome* dan *output*, dimana nilai *outcome* berisi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner kepada masyarakat Sulawesi utara.

Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi utara yang bertempat di Jalan kompleks pertanian kalasey, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Waktu Penelitian tanggal 1 September – 3 Oktober 2013.

Prosedur Penelitian

1. Menentukan Rumusan Masalah
2. Merumuskan masalah penelitian
3. Mencari informasi yang mendukung penelitian
4. Menentukan metode penelitian

5. Memberikan saran
6. Membuat kesimpulan

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti (Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Jannah, 2010). Populasi penelitian ini adalah masyarakat/penduduk Provinsi Sulawesi Utara khususnya di kabupaten Minahasa.

Adapun responden untuk pengukuran *outcome* dalam penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang dianggap melihat atau merasakan secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait baik dari instansi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
2. Data kuantitatif yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2012 serta data pendukung lainnya.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) pada instansi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara atau instansi yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Pada dasarnya metode analisis penelitian ini menggunakan metoda analisis kuantitatif (*Descriptive Quantitative Analysis Method*). Setelah data terkumpul, selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan beberapa cara yaitu : diklasifikasikan dan dianalisis.

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja *Value For Money* adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang organisasi yang telah dilaksanakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara

Pengelolaan pembangunan perkebunan di Provinsi Sulawesi Utara, secara organisasi dimulai tahun 1967 yang dipimpin oleh Bapak Jan Senduk dan Wakil Kepala Dinas Bapak Langkay. Pada tahun 1970 diberi nama Dinas Perkebunan Rakyat dan berubah lagi pada tahun 1974 dengan nama Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara selanjutnya sejak tahun 2003 menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.

Status dan Dasar Hukum

kedudukan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Sekretaris daerah provinsi. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008, mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan desentralisasi dan kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan kepada provinsi di bidang perkebunan.

Visi dan Misi

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara “Terwujudnya peningkatan pembangunan perkebunan yang produktif dan berdaya saing secara berkelanjutan mendukung terbukanya pintu gerbang ke Asia Pasifik.”

Sejalan dengan Visi tersebut, maka Misi Dinas perkebunan adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, deversifikasi, ekstensifikasi dan Intergrasi perkebunan.
2. Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan
3. Mengembangkan dan menggerakkan sub sistem (hulu, usahatani, hilir, dan penunjang) dalam sistem dan usaha agribisnis perkebunan melalui hubungan kerjasama yang produktif dan efisien dengan instansi pemerintah, swasta dan petani perkebunan.
4. Meningkatkan penerapan teknologi baru dalam pengembangan usaha perkebunan.
5. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas perkebunan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perkebunan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

Sedangkan Fungsi Dinas Perkebunan adalah perumusan kebijakan teknis; penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Utara No. 59 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.

Pembahasan

Program dan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2012, telah ditetapkan sasaran dengan dukungan program dan kegiatan sebagai salah satu strategi pencapaian sasaran. dalam mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah 11 program dan 15 kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/*policy* yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dengan rincian program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2012. Adapun Program yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan Penyediaan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan. Dengan indikator kinerja (LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara)

- a. *Input* : *Input* dana
- b. *Output* : Meningkatnya Luas Areal Kelapa, Cengkeh, Kakao, Pala, Aren. Dan tersedianya Sertifikasi Benih
- c. *Outcome* : Kualitas Luas Areal Produktif Tanaman Perkebunan.. Dan terpenuhinya Sertifikasi Benih

Indikator SPM, Target, dan Realisasinya

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan Penyediaan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.

Tabel 2. Indikator SPM, Target, dan Realisasinya Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Luas Areal :				
	- Kelapa	Ha	2.900	3.200	110,34
	- Cengkeh	Ha	1.825	2.364	129,51
	- Kakao	Ha	875	1.175	134,29
	- Pala	Ha	550	550	100,00
	- Aren	Ha	100	100	100,00
2.	Sertifikasi Benih	Bibit	1.483.125	1.485.797	100,18

Sumber : LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara 2012

Tercapainya sasaran meningkatnya luas areal produktif tanaman perkebunan adalah dengan melaksanakan Peremajaan/rehabilitasi dan intensifikasi, penyediaan bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta pengawasan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan.

Hasilnya terlihat dari tersedianya bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta terlaksananya pengawasan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan, yang terealisasi 100,18%.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Nilai Ekonomi

Seperti yang telah diterangkan pada Bab II, bahwa ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ukuran ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain dengan cara membandingkan harga yang digunakan organisasi sektor publik dengan organisasi sejenis, membandingkan dengan harga pasar, atau membandingkan dengan anggaran yang telah disetujui. Nilai Ekonomi dari program-program yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, dapat diukur dengan membandingkan *input* primer (dana yang terealisasi) dengan *input* sekunder (jumlah tani, benih/bibit, promosi, dan lain-lain). Dari hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan penulis, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan program kerjanya sesuai dengan prinsip ekonomis. Salah satunya dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimum yang memang diwajibkan bagi seluruh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga setiap SKPD memiliki target yang harus dicapai, seperti yang telah dibahas pada Subbab 4.2 mengenai Indikator SPM, Target, dan Realisasinya.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Harga Input}} \times 100\%$$

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, dana input pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan sebesar Rp 6.864.737.000, terlaksana 100%.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekonomis} &= \frac{6.864.737.000}{6.864.737.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Nilai Efisiensi

Efisiensi diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*. Persentasi nilai *input* yang digunakan adalah dari perbandingan nilai *input* real dengan nilai *input* dalam anggaran, dalam hal ini telah diukur pada nilai ekonomis diatas. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*, atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Sesuai dengan batasan masalah yang penulis jabarkan dalam Bab I dan II, maka pengukuran *Value For Money* hanya sebatas pada 3 program dengan 3 kegiatan pada tahun

anggaran 2012. Nilai *output* yang digunakan dalam pengukuran ini adalah persentase perbandingan jumlah realisasi fisik yang dianggarkan. Sedangkan nilai *inputnya* merupakan persentase dari perbandingan *input* yang terealisasi dengan *input* yang dianggarkan. Maka rumus untuk pengukuran Nilai Efisiensi, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan dalam Tabel berikut :

Tabel 3. Data Target dan Realisasinya Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program	Uraian	Idikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persen
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Penyediaan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.	<i>Input</i>	Rupiah	6.864.737.000	6.864.737.000	100,00
			Ha	6.250	7.389	118,22
		<i>Output</i>				109,2
			Bibit	1.483.125	1.485.797	100,18

Sumber : LAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara 2012

Berdasarkan tabel di atas, maka pengukuran Nilai Efisiensi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara untuk kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= \frac{109,2\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 109,2\% \end{aligned}$$

Nilai Efektivitas

Hasil uji reabilitas untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan Penyediaan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan, menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha Coeffisien* sebesar 0.874. Ini menunjukkan bahwa kuesioner cukup reliabel, apabila digunakan untuk mengukur kembali objek yang sama, hasil yang ditunjukkan relatif tidak berbeda.

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas Data Kuesioner kegiatan Penyediaan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0
Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha		N of Items	
.874		5	

Sumber : Data diolah

Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan untuk kemudian digunakan dalam mengetahui tingkat kepuasan pelanggan.

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= (\text{IKmaks} - \text{IKmin}) : 5 \\ \text{IKmaks} &= \text{PP} \times \text{R} \times \text{EXmaks} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 5 \times 100 \times 5 \\
&= 2500 \\
IK_{\min} &= PP \times R \times EX_{\min} \\
&= 5 \times 100 \times 1 \\
&= 500 \\
\text{Interval} &= (2500 - 500) : 5 \\
&= 400
\end{aligned}$$

Tabel 5. Interval Kepuasan Masyarakat Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Interval	Kategori
500 – 900	Tidak Puas
900 – 1300	Kurang Puas
1300 – 1700	Cukup Puas
1700 – 2100	Puas
2100 - 2500	Sangat Puas

Sumber : Data diolah

Adapun indeks kepuasan pelanggan (masyarakat) yang diperoleh dari penyebaran kuesioner adalah 1669, yang berarti berada pada kategori cukup puas. Maka untuk mengetahui persentase pencapaian *outcome*, dapat ditentukan dengan rumus :

$$\begin{aligned}
\text{Nilai } outcome &= \left(\frac{\text{Batas bawah skala cukup puas} + \text{Batas atas skala cukup puas}}{2} \div IK_{\max} \right) \times 100\% \\
&= \left(\frac{1300 + 1700}{2} \div 2500 \right) \times 100\% \\
&= 60\%
\end{aligned}$$

Setelah nilai *outcome* kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita peroleh dengan perhitungan :

$$\begin{aligned}
\text{Nilai Efektivitas} &= \frac{Outcome}{Output} \times 100\% \\
&= \frac{60}{109,2} \times 100\% \\
&= 54,9\%
\end{aligned}$$

Angka 54,9% ini menunjukkan bahwa Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan Penyediaan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan belum terlaksana secara efektif. Hal ini berarti bahwa program yang dilaksanakan pemerintah belum memuaskan masyarakat secara maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara melalui pendekatan *Value For Money*. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan Penyediaan benih/bibit unggul bermutu dan bersertifikat serta Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan telah melaksanakan kinerjanya dengan ekonomis. Nilai efisiensi menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu mencapai 109,2%, mampu menghasilkan *output* 109,2% dengan *input* 100% yang telah ditentukan, hal ini menyatakan bahwa program ini sangat efisien. Nilai efektivitas menunjukkan hasil 54,9% belum mencapai hasil yang maksimal, dengan nilai *outcome* mencapai 60%, hal ini menyatakan bahwa program ini tidak efektif.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis telah melaksanakan kinerjanya dengan ekonomis. Nilai efisiensi menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu mencapai 141,18%, mampu menghasilkan *output* 141,18% dengan *input* 100% yang telah ditentukan, hal ini menyatakan bahwa program ini sangat efisien. Nilai efektivitas menunjukkan hasil 53,8% belum mencapai hasil yang maksimal, dengan nilai *outcome* mencapai 76%, hal ini menyatakan bahwa program ini tidak efektif.
3. Program Peningkatan nilai tambah, daya saing, industry hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian, dengan kegiatan Promosi Produk Pertanian/Perkebunan (Pameran, Brosur, Leaflet, dll) telah melaksanakan kinerjanya dengan ekonomis. Nilai efisiensi menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu mencapai 100%, mampu menghasilkan *output* 100% dengan *input* 100% yang telah ditentukan, hal ini menyatakan bahwa program ini sangat efisien. Nilai efektivitas menunjukkan hasil 60% belum mencapai hasil yang maksimal, dengan nilai *outcome* mencapai 60%, hal ini menyatakan bahwa program ini kurang efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya masyarakat tani dengan merata di setiap daerah, dan terus memberikan kenyamanan bagi masyarakat, karena pentingnya faktor perkebunan bagi kelangsungan hidup bangsa.
2. Berusaha untuk terus memenuhi target penyelesaian kinerja dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal, agar selain tingkat ekonomi dan efisiensi tercapai, efektivitas pun dapat ditingkatkan dengan adanya kepuasan dari masyarakat.
3. Rutin memberikan pelatihan kepada petani dan pelaku agribisnis agar mampu memberikan hasil terbaik dari perkebunan, dan menjadi lebih terampil dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta. Jakarta
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta. penerbit PT Indeks.
- Ekawarna, Shita Unjaswati; Iskandar Sam; Sri Rahayu.2009. *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Universitas Negeri Jambi, dalam Jurnal Cakrawala Akuntansi, Volume 1, Nomor 1.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YPKN.
- Halim, Abdul. 2010. *Seri Bunga Rampai Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP STIM YPKN
- Hery, 2012. *Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*. Edisi pertama. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo.2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Nafarin, M.2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nugrahani, Tri Siwi.2007. *Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Paper Akmenika UPY, Volume 1, 2007.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dinas Perkebunan.2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012*. Manado.
- Smith, Peter C.2009. *Measuring Value For Money in Health Care : Concepts and Tools*. University of York : Centre for Health Economics.
- Tanjung, Abdul Hafiz.2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi*. Bandung. Alfabeta.
- Yang diakses dari internet:
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi> diakses pada 3 Oktober 2013 jam 09.10
- http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_pemerintahan diakses pada 3 Oktober 2013 jam 10.15
- http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_sektor_publik diakses pada 3 Oktober 2013 jam 09.15